

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

---

# RENCANA STRATEGIS 2015-2019

---



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

## KATA PENGANTAR

Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Unit Kegiatan Eselon II dari Direktorat Jenderal yang baru saja terbentuk pada awal bulan Juli 2015 untuk memperkuat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka dasar hukum yang digunakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan pengelolaan hutan menjadi lebih kuat, dan menjadi tantangan utama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat menegakkan hukum tersebut. Untuk dapat menegakan hukum yang tegas dan konsisten, maka diperlukan perencanaan yang matang agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat focus dan tepat sasaran. Rencana Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dirancang dalam kurun waktu 5 tahun dan dituangkan dalam buku ini.

Buku ini berisikan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019, dan merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 s/d 2019, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dua alasan pokok mengapa Rencana Strategis disusun dan ditetapkan, yaitu karena sesuai dengan kaidah manajemen, terutama pentingnya perencanaan, dan kaidah substansi, yaitu yang diamanatkan oleh kebijakan nasional yang berkenaan dengan pembangunan nasional.

Rencana Strategi ini disusun dengan mengikuti pedoman mengenai penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), terutama pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Permen-PPN/KA-Bappenas nomor 5/2014, dan Permen KLHK no P.40/MenLHK-Setjen/2015 mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Strategis lingkup KLHK tahun 2015-2019.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis ini maka diharapkan tidak hanya memberikan arahan kepada seluruh jajaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akan tetapi juga dapat memberikan informasi kepada unit lainnya di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mitra pembangunan dan masyarakat luas

Jakarta, Desember 2015

Ttd

Sekretaris Direktur Jenderal  
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
BAB I	Pendahuluan	
	1.1 Kondisi Umum	1
	1.2 Potensi dan Permasalahan	12
BAB II	Strategi Rencana Strategis	16
BAB III	Kerangka Pendanaan	24
	Lampiran A	
	Usulan Perubahan Nomenklatur Rencana Strategis Eselon II	26
	Tabel	
	Lampiran A: Sasaran dan Indikator Unit Kegiatan	28
	Lampiran B : Target dan Kerangka Pendanaan Unit Kegiatan	30
	Lampiran C : Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	34
	Lampiran D : Target dan Kerangka Pendanaan Elemen Kegiatan	40

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Kondisi Umum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019. Disebutkan bahwa Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Renstra Unit Kerja Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, serta Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Tahun 2019. Selanjutnya Renstra Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan pentingnya upaya strategis untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk penegakan hukum telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.2/PHLHKSETDIT/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

Upaya strategis tersebut dituangkan salah satunya sebagai Renstra Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK yang menjadi kesepakatan baik dalam sasaran kegiatan, pendanaan maupun ukuran keberhasilannya sehingga seluruh aktifitas dapat mendorong tercapainya target yang telah digariskan di dalam Renstra Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2015-2019 dan selanjutnya memberikan dampak pada pencapaian sasaran yang tercantum pada Renstra Kementerian LHK Tahun 2015 -2019. Proses penyusunan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK ini dilakukan melalui rangkaian diskusi dan penelaahan hasil evaluasi dengan melibatkan seluruh Bagian di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dengan pokok bahasan meliputi identifikasi permasalahan/kondisi pemungkin dalam pencapaian target yang telah digariskan dalam Renstra Direktorat Jenderal PHLHK, upaya-upaya yang akan dilakukan dan indikator keberhasilan.

## Kondisi Saat Ini

Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019 disusun berdasarkan target capaian pembangunan yang ditetapkan dalam di dalam Renstra Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2015-2019 sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLH-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kinerja yang dicapai pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK, diharapkan dapat mencapai kinerja pada skala Direktorat Jenderal PHLHK. Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan, Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK memiliki satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PHLHK. Output/keluaran kegiatan tersebut adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PH LHK berjalan secara efektif dan efisien, baik di pusat maupun daerah (UPT dan Pemerintah Daerah). Dengan demikian Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dimaksudkan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara garis besar kerangka dalam penyusunan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Ditjen PHLHK memiliki kewenangan dalam koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal PHLHK.
- b. Kepastian pembiayaan dari APBN
- c. Tersedia sarana dan prasarana kerja (gedung, kendaraan dan perlengkapan lainnya) dan tersedianya sumber daya manusia yang cukup memadai
- d. Tersedianya Kerangka Hukum yang Jelas dalam rangka penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- e. Semakin tingginya komitmen terhadap terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Gambaran Kondisi Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PH LHK saat ini, didekati dengan hasil pelaksanaan kegiatan pada Deputi Penataan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Direktur Pencegahan dan Pengamanan hutan Kementerian Kehutanan sejak tahun 2009 – 2014, ketersediaan dan sumberdaya manusia, sarana prasarana yang dimiliki, anggaran yang telah direncanakan dan dimanfaatkan, dengan kondisi sebagai berikut :

### **Kondisi Kelembagaan Penegakan Hukum**

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan gabungan dari Deputi Penataan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Kementerian Kehutanan, yang kemudian bersatu menjadi 4 direktorat dan didukung oleh Sekretariat Jenderal. Pada tahun 2015, Ditjen Penegakan Hukum menggunakan UPT yang berada pada Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk mengamankan hutan dan menindaklanjuti kasus-kasus yang berada di kawasan hutan.

### **Kondisi Sumber Daya Manusia**

Kekuatan Sumber Daya Manusia Ditjen Gakkum yang menjadi Ujung Tombak Pelaksanaan Penegakan Hukum adalah Polisi Hutan (Polhut), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ketiga fungsi tersebut akan melakukan kegiatan Pengamanan Kawasan Hutan, Penanganan Pengaduan, Pengawasan Izin, Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Pidana.

Kawasan Luas Hutan yang menjadi wewenang KLHK untuk dipertahankan sebesar **129,425,443 Hektar**. Seluruh kawasan tersebut perlu dilakukan pengamanan oleh polisi hutan yang berlokasi pada pemangku kawasan, sedangkan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan fokus kepada mempertahankan hutan yang terancam dari gangguan keamanan yaitu **13 juta Ha**. Pada saat ini jumlah Polisi Hutan yang bertugas mengamankan Kawasan Hutan tersebut di atas adalah sebanyak **2713** yang tersebar di 77 lokasi yang diprioritaskan untuk menjaga Hutan Konservasi. Sedangkan Dinas

Kehutanan Provinsi/kab mempunyai **4695** polisi hutan ( 4482 non fungsional dan 213 fungsional) untuk menjaga **70** juta Ha Hutan yang menjadi kewenangan Provinsi yaitu Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi Konversi. Dengan Demikian Jumlah Polisi Hutan di Indonesia adalah sebesar 7408 orang. Dengan data tersebut di atas, untuk menjaga kawasan hutan, maka 1 polhut menjaga 17.471 Ha. Sebagai bahan perbandingan, standard ideal dari Polisi Hutan Thailand adalah 1 : 2500 Ha. Apabila perbandingan Polhut yang dibutuhkan 1: 10.000 Hektar, maka dibutuhkan 12.943 Polhut, atau kekurangan 5.535 orang atau 1.400 polhut per tahun.

Sedangkan PPLH mempunyai fungsi untuk melakukan penanganan pengaduan, pengawasan baik izin maupun sanksi administrasi. Selama kurun waktu 3 tahun (2012-2015), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan **878 izin**. Apabila ditambahkan dengan Izin yang terdapat didaerah, berupa izin lingkungan, PPLH dan Kehutanan sebanyak kurang lebih 20.000 izin yang merupakan tugas *second line enforcement* KLHK. Sekitar **2000 izin** yang akan dilakukan pengawasan oleh KLHK terutama terkait dengan prioritas nasional yaitu Kebakaran Hutan dan Pertambangan. Sedangkan jumlah pengaduan pada akhir 2014 adalah sekitar **500 pengaduan** yang perlu ditindaklanjuti dan diselesaikan. Sedangkan untuk proses penerapan Sanksi Administrasi diperlukan PPLH untuk melakukan verifikasi, dan pengawasan penerapan sanksi Administrasi sebesar 300 sanksi.

Pada saat ini Jumlah fungsional PPLH di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak **41** orang yang terdiri atas: 15 orang PPLH di Direktorat PPSA, 6 orang PPLH Pusat di luar Direktorat PPSA, 7 orang PPLH P3E Bali-Nusra, 6 orang PPLH P3E Sumatera, 4 orang PPLH P3E Sulawesi-Maluku dan 4 orang PPLH P3E Jawa. Jumlah tersebut tidak memadai untuk menangani ketiga kegiatan tersebut, diperlukan 200 PPLH yang berkompeten untuk melakukan ketiga kegiatan tersebut.

Jumlah PPNS yang sudah dilatih dan ditetapkan pada akhir tahun 2014 adalah sebanyak 840 PPNS LH dan Kehutanan yang terdiri dari PPNS Kehutanan sebanyak 744 PPNS Kehutanan, 96 PPNS LH dan PPNS Provinsi sebanyak 282 PPNS Hut dan 320 PPNS LH. Jumlah PPNS tersebut perlu diverifikasi karena banyak yang telah menempati jabatan struktural, PPNS **bukan jabatan fungsional** sehingga tidak mempunyai daya tarik untuk perbaikan gaji dan karier.

### Kondisi Sarana Prasarana

Sebagai Ditjen yang terbentuk dari dua kementerian, maka ditjen Penegakan hukum disatukan ruang bekerjanya menjadi satu tempat untuk memudahkan konsolidasi, akan tetapi sarana dan prasarana untuk ruang bekerja, ruang pertemuan, ruang investigasi, ruang operasi, ruang barang bukti belum tersedia. Sedangkan di UPT, ruang yang dikhususkan untuk penegakan hukum hanyalah ruang markas komando untuk brigade Satuan Pengaman Operasi Reaksi Cepat (SPORC) yang tidak seluruhnya dilengkapi dengan penjara.

Untuk dapat melakukan Operasi Pengamanan Hutan, kondisi sarana prasarana yang terdapat pada saat ini adalah :

**Tabel Data Sarana Prasana Polisi Hutan**

NAMA SARANA PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
Kendaraan Patroli Roda-2	549	Unit
Kendaraan Patroli Roda-4	197	Unit
Speed Boat	29	Unit
Perahu Karet	8	Unit
Kapal Patroli Cepat 36 meter	4	Unit
Floating Station	4	Unit
Pesawat Ultra Ringan	8	Unit
Senpi Genggam (Pistol)	500	Pack
Senpi Laras Panjang (PM1A1)	3.000	Pack
Senpi Laras Panjang (Molot)	200	Pack
Senpi Bius	62	Pack



Untuk melakukan pengamanan hutan seluas 129 juta hektar, maka sarana dan prasana yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan pengamanan.

### **Kondisi Legalitas Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Setidaknya terdapat enam undang-undang yang menjadi dasar Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu UU No. 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya; dan UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Dari UU tersebut di atas, terdapat GAP peraturan turunan yang perlu segera di atur dan diselesaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pelaksanaan penegakan hukum harus dilandaskan pada aturan dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada saat ini, terdapat Aturan pelaksanaan yang menjadi dasar bagi kegiatan penegakan hukum yang perlu dilakukan perbaikan segera yaitu : Perbaikan Surat Keputusan Mengenai PPNS terutama PPNS Kehutanan yang pada saat ini hanya bisa menyelidiki kasus yang terjadi di kawasan kehutanan; Perbaikan aturan terkait PNBK untuk hasil yang didapatkan dari penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Aturan yang mendetail pada saat ini terdapat untuk Polisi hutan berupa pedoman operasi, seragam, insentif dan disinsentif, sedangkan untuk PPNS dan PPLH baru tersusun pedoman dan tata cara bekerja.

Dari data kondisi saat ini diketahui jarak (gap) dengan kondisi yang diinginkan yang didapat dari indikator di dalam Renstra Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2015 -2019 dan diverifikasi dalam indikator kinerja kegiatan (IKK) di dalam Renstra Kementerian LHK Tahun 2015 – 2019. Dari sinilah akan diidentifikasi permasalahan/kondisi pemungkin secara umum melalui pemahasan-pembahasan dengan seluruh Bagian di lingkup Sekretariat Direktorat jenderal PH LHK. Permasalahan/kondisi pemungkin yang ada akhirnya menjadi dasar dalam

menentukan komponen kegiatan dan indikator dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK.

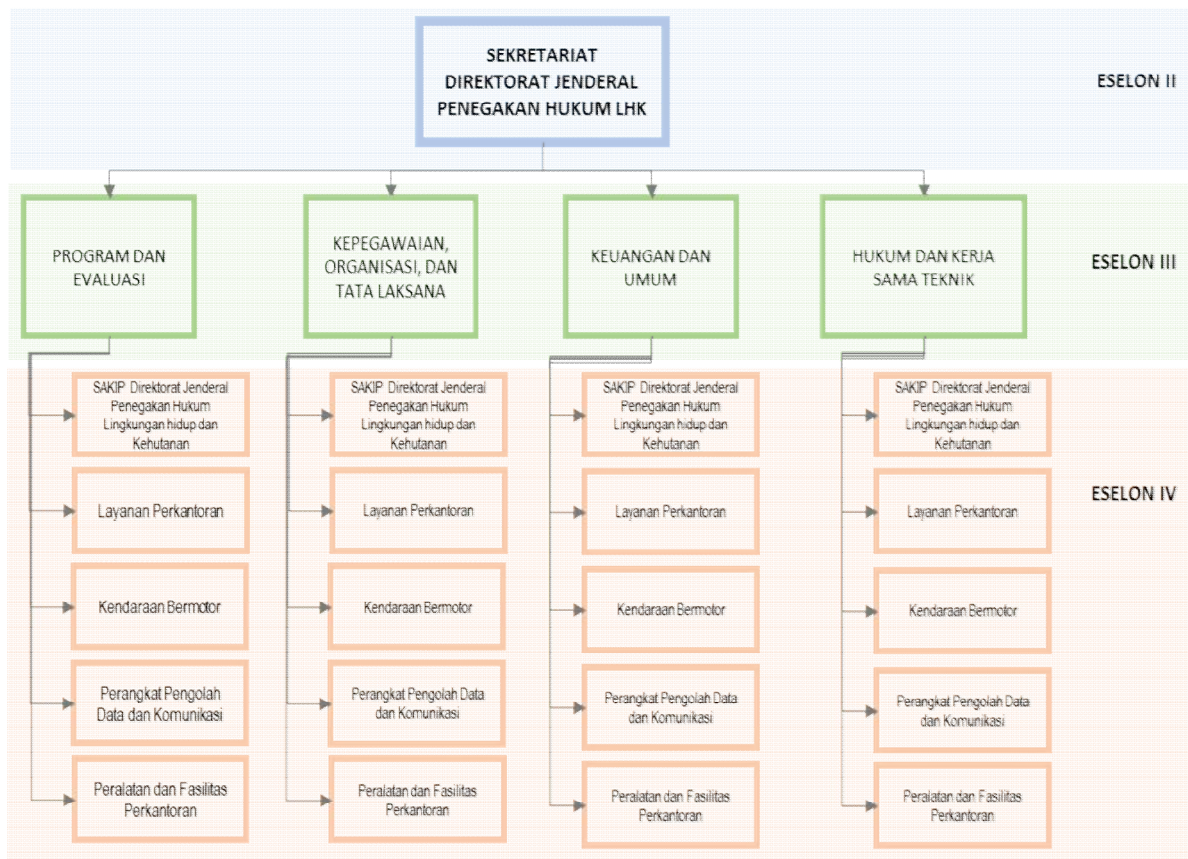
Saat ini ada beberapa isu yang menjadi fokus utama Setditjen Penegakan Hukum diantaranya pembentukan UPT Penegakan Hukum, Penerapan Revolusi mental dan Pencapaian SAKIP dan Laporan Keuangan yang WTP. Untuk memberikan dukungan yang maksimal terhadap seluruh kegiatan penegakan hukum, maka isu-isu yang perlu segera diperbaiki melingkupi 1) perencanaan program, anggaran dan evaluasi yang akuntabel; 2) penyampaian data dan informasi baik untuk publik, DPR maupun internal KLHK yang akurat dan tepat waktu; 3) perbaikan kelembagaan baik di pusat maupun UPT yang efektif dan efisien; 4) penyelesaian Aspek hukum pelaksanaan penegakan hukum yang terpadu; 5) pemenuhan sumber daya manusia yang berkompeten; 6) pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, 7) Pengelolaan aset dan keuangan termasuk didalamnya pencatatan, pembukuan, pelaporan, penggunaan serta kondisinya yang lengkap dan transparan.

### **Asas Legal**

Definisi dari tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikemukakan dan diuraikan dalam Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2015 Pada BAB XII, Pasal 1111 menjelaskan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

### **Struktur Organisasi dan Tupoksi**

Sesuai dengan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja dengan struktur organisasi yang disusun dan diagram Gambar 1.2



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Penyelesaian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Adapun pada Pasal 1112 dijabarkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1111, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kerjasama teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja, pembinaan sumber daya penegak hukum, pelayanan profesi sumber daya penegak hukum, serta sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

### **Potensi dan Permasalahan**

Sebagai unit yang bertanggungjawab dalam memastikan kegiatan dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang tepat yang sesuai dengan arah dan kebijakan Ditjen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk berkontribusi terhadap tujuan pembangunan, memilah strategi yang paling jitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan penegakan hukum yang dirasakan masyarakat, sehingga rencana yang berjalan dapat tepat mengenai sasaran. Strategi yang dipilih tentu butuh didasari oleh realita mengenai apa yang dimiliki dan dikuasai sebagai potensi dan permasalahan apa yang sedang menghadang dan/atau akan cepat atau lambat dihadapi.

Saat ini, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyoroti beberapa permasalahan yang tengah dialami. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, permasalahan ini diharapkan dapat segera dapat ditangani. Namun tidak terbatas pada permasalahan ini saja, strategi Rencana Strategis ini dibangun. Selain sesuai dengan permasalahan tersebut, mengacu pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal ini, dengan melakukan analisis mengenai apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman dari luar (SWOT Analysis) juga, yang menjadi pertimbangan strategi apa yang dicanangkan dalam penyusunan Renstra.

Dari kondisi yang ada, yang menjadi modal/potnensi Ditjen Penegakan Hukum, terdapat permasalahan yang dirasakan tengah dihadapi adalah sebagai berikut:

#### **1. Sumberdaya manusia bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

- a. Jumlah SDM yang pensiun dan yang akan memasuki usia pensiun tidak diikuti dengan penambahan/pengangkatan SDM baru yang beirimbang, sehingga terjadi kesenjangan jumlah tenaga pengamanan hutan di lapangan.
- b. Distribusi jumlah SDM yang ada belum merata, ada UPT/Dinas yang memiliki banyak SDM (di Pulau Jawa) dan ada yang masih sedikit jumlah SDMnya (di luar Pulau Jawa).
- c. Jumlah tenaga SDM yang ada belum diimbangi dengan peningkatan keterampilan memadai.
- d. Jumlah SDM jumlahnya berkurang karena ada yang memasuki pensiun dan ada yang dikeluarkan dari keanggotaan SDM karena melakukan tindakan indisipliner. Selain itu, Penambahan jumlah SDM dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini tidak ada karena belum adanya dukungan kebijakan penambahan SDM.

#### **2. Sarana dan prasarana Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

- a. Jumlah sarana dan prasarana Penegakan Hukum, khususnya kendaraan untuk patroli masih belum memadai, menurut Permenhut No. P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan, idealnya setiap 2 (dua) orang Polhut memiliki 1 (satu) kendaraan motor operasional pengamanan hutan (motor Polhut). Saat ini apabila asumsi jumlah total yang ada dapat berfungsi semua, maka perbandingannya adalah 1 (satu) motor untuk 3 – 4 orang Polhut.

- b. Dari jumlah sarpras SDM yang ada, keberadaannya ada yang sudah memerlukan penggantian karena kerusakan berat, khususnya sepeda motor/mobil patroli.
- c. Markas Komanda tidak seluruhnya memadai, terdapat banyak mako yang tidak mempunyai ruang yang cukup untuk

### **3. Kelembagaan**

- a. Kelembagaan Pencegahan dan Penegakan Hukum LHK belum dapat diimplementasikan.
- b. Belum ada kepastian kebijakan terkait kelembagaan Pencegahan dan Penegakan Hukum LHK.

### **4. Peraturan**

- a. Draft Permen LHK tentang Pencegahan dan Penegakan Hukum LHK masih dalam proses pembahasan untuk disahkan.
- b. Melihat amanat dari PP No. 45 Tahun 2004 dan kebutuhan untuk mendukung operasional kegiatan di lapangan, masih diperlukan peraturan-peraturan, pedoman, maupun standar yang perlu disusun.

### **5. Karakter Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas di dalam Permasalahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalami perubahan trend. Pada periode tahun 2005 – 2009, permasalahan kehutanan yang sangat marak adalah adanya aktivitas *illegal logging* dan peredaran kayu ilega dan di bidang lingkungan hidup yang sangat marak adalah pencemaran, sampah dan limbah B3 dan telah menjadi perhatian masyarakat global. Sampai kurun waktu akhir 2009, *illegal logging* skala besar dapat ditekan dan turun secara signifikan, meskipun dalam skala kecil masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Periode tahun 2010 – 2014, perkembangan permasalahan selanjutnya adalah meningkatnya tidak kejahatan kehutanan lain yaitu perambahan kawasan konservasi dan peredaran ilegal TSL. Sampai awal periode 2015 – 2019 ini perambahan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural masih banyak terjadi, disamping perburuan dan peredaran satwa liar ilegal. Disamping itu, kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 juga meningkat.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK adalah seperti yang dijabarkan di atas. Akan tetapi, memandang dari satu aspek saja tidak cukup untuk membuat rencana yang strategis. Oleh karena itu, Direktorat ini melakukan kajian terhadap permasalahan dan potensi kondisi internal dan eksternal yang dikenal dengan SWOT.

Berdasarkan hasil penjabaran SWOT tersebut, strategi ditentukan dengan menganalisis faktor yang paling dominan dari sisi internal dan eksternal.

Meninjau dari hasil analisa SWOT dan beberapa isu strategis, maka yang menjadi fokus utama penyusunan rencana kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya adalah:

- a. Dukungan Manajemen untuk Penegakan hukum kehutanan harus terus ditingkatkan baik berupa kegiatan pre-emptif, preventif, dan represif.
- b. Dukungan Manajemen untuk Optimalisasi kinerja SDM di masing-masing Unit dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- c. Dukungan Manajemen di dalam Pembentukann dan penguatan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) di seluruh balai KSDA dan Taman Nasional
- d. Pelaksanaan Teknis di dalam Pemenuhaan kebutuhan sarana dan prasarana Pencegahan dan Penegakan Hukum.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ditjen PHLHK memiliki potensi dan juga menghadapi permasalahan, baik internal maupun eksternal, beberapa diantaranya telah diungkapkan dalam Sub Bab 1.1 tersebut di atas. Secara garis-besar, hasil identifikasi potensi dan permasalahan termaksud di atas adalah sebagai berikut:

### A. Internal

- **Potensi:**
  - Kewenangan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan menjadi lebih luas, sebagai implikasi dari bergabungnya dua Kementerian menjadi Kementerian LHK, antara lain karena bertambahnya jumlah Undang Undang yang berkenaan

dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Peraturan perundang-undangan pada tingkatan normatif cukup sebagai landasan hukum.

- Jumlah sumber daya potensial juga bertambah signifikan, sebagai implikasi dari bergabungnya dua Kementerian menjadi Kementerian LHK.
- Sumberdaya aparatur pada tingkat manajemen sudah mendukung penerapan penegakan hukum.
- **Permasalahan:**
  - Kapasitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, terutama kapasitas sumberdaya manusia dan kapasitas teknologi pirantinya, relatif belum memadai untuk menghadapi/mengatasi tantangannya, mengingat pertumbuhan kapasitas lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan problematik yang mesti dihadapi/diatasnya, seperti misalnya pada kasus kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi tiap tahun, kasus ancaman terhadap kepunahan sejumlah spesies dan penurunan keanekaragaman hayati yang cenderung meningkat, dst.

Kapasitas Ditjen PHLHK, terutama *leadership* dan manajemennya, masih harus diperkuat, agar mampu meyakinkan pentingnya penegakan hukum lingkungan hidup kepada instansi-instansi terkait. Kapasitas yang sekarang ini akan menjadi relatif kurang memadai jika dibandingkan dengan tantangan dan situasi yang tumbuh dan berkembang pada kurun waktu belakangan ini hingga tahun 2019.

Sumberdaya aparatur pada tingkat operasional belum yang memadai relatif dibandingkan dengan tantangannya. Prasarana dan sarana belum memadai relatif dibandingkan dengan permasalahan teknis yang harus diatasi.
  - Akses informasi bagi publik yang dinilai masih harus diperbaiki, antara lain agar publik dapat berperan serta, antara lain melalui mekanisme *whistle blower*, kontrol sosial, pengaduan, dan peranserta dalam mata rantai pengawasan dalam rangka penegakan hukum administrasi.
  - Jumlah PPNS dan PPLH tidak cukup untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pidana, antara lain karena persoalan jabatan fungsional nya.



- Peraturan perundang-undangan pada tingkatan prosedur operasional belum lengkap dan atau perlu dimuthahirkan.

## **B. Eksternal**

### **▪ Potensi:**

- Peran penegakan hukum merupakan bagian penting dari isu mengenai keadilan, dan isu ini diposisikan pada tiga isu strategis dari Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (RPJMN 2015-2019).
- Penegakan hukum lingkungan hidup diamanatkan secara eksplisit, kepada kementerian yang membidangi lingkungan hidup, oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Besarnya harapan publik atas tegaknya keadilan, demikian juga perhatian, dukungan, aspirasi, dan ekspektasi publik yang besar pada keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan

### **▪ Permasalahan:**

- Regulasi yang diperlukan sebagai dasar hukum untuk efektifitas pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih cukup banyak yang harus ditetapkan, antara lain peraturan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, peraturan pelaksanaan mengenai keanekaragaman hayati, peraturan pelaksanaan mengenai perizinan lingkungan hidup, kepastian dan kejelasan hukum tentang batas-batas kawasan hutan dan lahan, dst.
- Pembagian tugas-tugas penegakan hukum antara “pusat dan daerah” perlu segera dimutakhirkan aturan penyelarasannya, untuk mencegah terjadinya saling lempar urusan dari daerah ke pusat dan atau sebaliknya, karena perubahan cara kerja dan koordinasi di tingkat Pusat dan tingkat Daerah, yang merupakan implikasi dari penggabungan dua kementerian menjadi Kementerian LHK.
- Kapasitas penegakan hukum di Kabupaten berada pada nilai indeks yang terendah, sedangkan di tingkat Nasional pada nilai indeks yang tertinggi. Kesejangan nilai indeks tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan perubahan

manajemen, baik oleh jajaran pemerintah di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, agar penegakan hukum menjadi lebih berhasil.

- Kemungkinan turunnya kepercayaan publik atas efektifitas penegakan hukum perlu diantisipasi.
- Meningkatnya kompleksitas dan moda baru perilaku kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Perubahan paradigma pemerintah yang ingin memberikan akses besar terhadap masyarakat menimbulkan banyaknya pendudukan hutan secara illegal.
- Besarnya harapan rakyat akan keadilan.
- Jumlah dan kompleksitas kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang cenderung meningkat.

## **Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender**

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Strategi Pengarusutamaan Gender untuk menghilangkan atau mengurangi kesenjangan gender di bidang pembangunan tertulis di Inpres no.9/2000, UU nomor 25 tahun 2004, peraturan presiden nomor 2 tahun 2015, perpres nomor 2 tahun 2015, PMK/No.130/PM.02/2014.

Strategi Nasional percepatan pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG), banyak progress tetapi masih banyak yang harus di capai (PUG) yang belum di implementasikan dengan baik; belum melembaga. Dikeluarkan Surat Edaran Strategis Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender (PPRG) yang ditandatangani 4 menteri (BAPPENAS, KemKeu, KPP&PA, dan Kemendagri). PPRG adalah PUG diperencanaan agar responsive gender melalui analisa gender. Tahun 2000 BAPPENAS dan KPP&PA mengembangkan piranti analisa untuk perencanaan yang responsive gender (GAP&POP), ada dua komponen(1) GAP adalah piranti PPRG adalah PUG di penganggaran agar Responsif Gender; kegiatan-kegiatan hasil analisa gender yang dianggarkan.

Melembagakan PUG, Pelembagaan PUG Memerlukan dukungan politis dari pimpinan, yang diterjemahkan kedalam kebijakan, berada dalam struktur birokrasi dan mekanisma yang strategis, ada SDM yang memiliki kesadaran, kepekaan, respon, ketrampilan dan motivasi kuat dalam melaksanakan PUG di unitnya da nada dana untuk melaksanakan (PUG) (Kelompok Kerja, Forum, dst). Tersedia data terpilah menurut jenis kelamin dalam baseline yang diupdate dan dipergunakan, dilengkapi piranti analisa untuk PPRG, Pemantauan dan Evaluasi, Ruang untuk masyarakat madani partisipasi dalam dialog/forum publik, studi kebijakan dst.

## BAB II

### STRATEGI RENSTRA

#### Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah dijabarkan dalam buku Rencana Strategis Kementerian Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 telah selesai disusun, melalui buku ini Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun rencana strategis yang mengalir dari hulu hingga memberi dampak di hilir. Rencana strategis Sekretariat Direktorat telah dikemas menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang sudah ditetapkan pada Renstra Kementerian dan Renstra Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Agar rencana-rencana Direktorat ini dapat memberi pengaruh untuk mengenai sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, penyusunan rencana strategis ini dilakukan dengan secara hati-hati dan seksama agar aktivitas yang terselenggara mampu menunjang sasaran strategis dan sasaran program secara rasional dan logis. Sehingga apa yang dilaksanakan benar-benar akan mampu membawa lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia ke arah yang positif. Untuk mencapai hal itu, upaya dalam penyusunan Rencana Strategis ini menggunakan metode perencanaan *logic model*. Logika yang ditunjukkan dengan metode perencanaan ini adalah dengan menggambarkan bahwa apabila kegiatan yang dilakukan terlaksana dan mampu mencapai sasaran kegiatan tersebut, maka sasaran program yang ditetapkan mampu diperoleh hingga tercapainya sasaran strategis. Untuk memperjelas alur logika dari perencanaan renstra, maka struktur perencanaan renstra tersebut digambarkan pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1 Struktur Sasaran pada Sistem Perencanaan Kementerian LHK Dalam Renstra Kementerian LHK Tahun 2015 – 2019 ditetapkan Sasaran Strategis**

Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, dan Sasaran Strategis sudah ditetapkan dalam penyusunan renstra kementerian untuk Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mendukung terlaksananya kegiatan dan sasaran program tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut menetapkan sasaran unit kegiatan dan indikator-indikator yang sinergis dan tepat sasaran. Melanjutkan rencana tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat perencanaan strategis untuk menetapkan sasaran elemen kegiatan dan indikator yang menopang dan membangun aktivitas pencapaian sasaran unit kegiatan.

#### **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK**



**Gambar 2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK**

Skema alur *logic model* mengenai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK dijelaskan pada Gambar 2.2. Sasaran dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK ialah bahwa reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus terwujud.

### Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan

Melanjuti Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan, setiap unit kegiatan menyusun Sasaran dan Indikator Unit Kegiatan yang kontinu dengan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan. Sama seperti perencanaan sebelumnya, dalam penyusunannya pun menggunakan metode perencanaan *logic model* untuk memastikan dalam pelaksanaannya berkesinambungan.

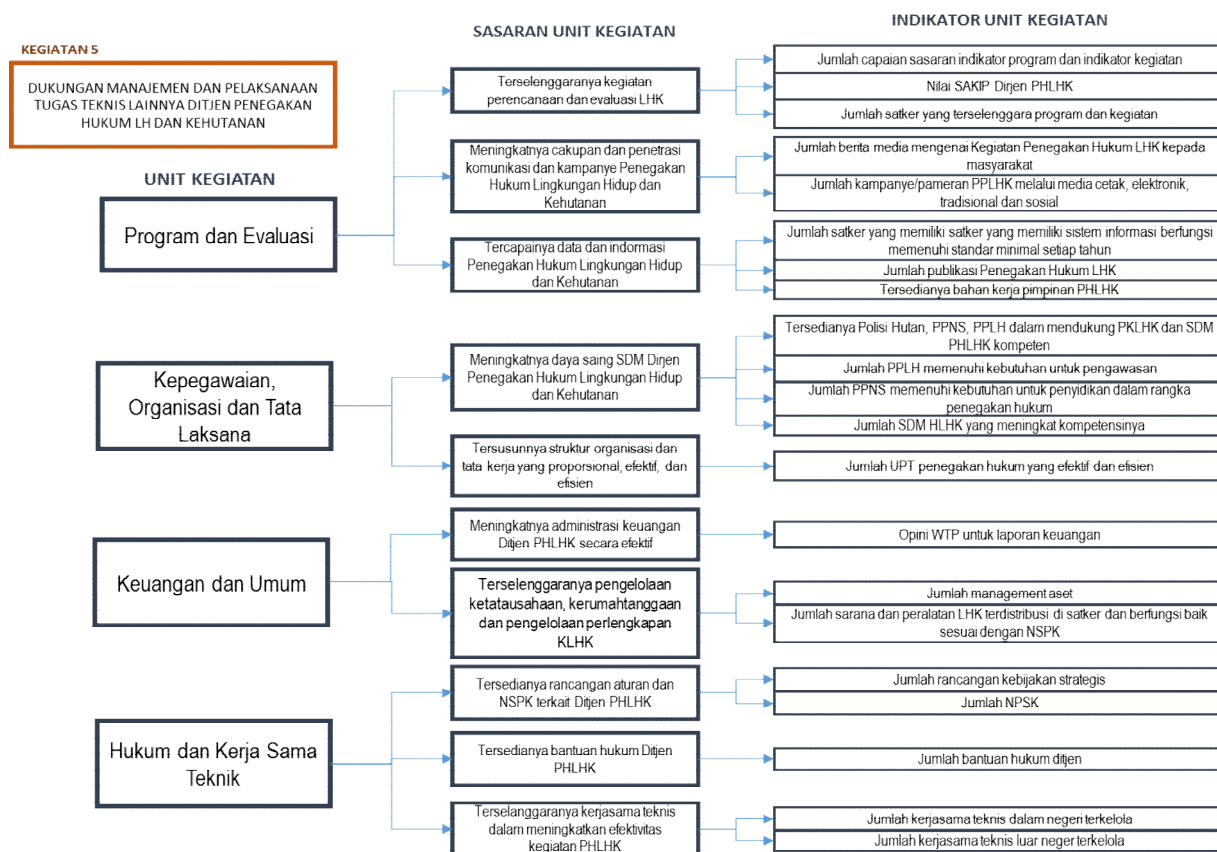
Untuk memastikan bahwa antara Unit Kegiatan memiliki rencana yang sejalan dengan Kegiatan yang telah ditentukan, maka Unit Kegiatan dalam Pencegahan dan Pengamanan Hutan dipastikan terlibat dan memiliki andil dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan seperti pada Gambar 2.3. Pada Direktorat ini, terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi sasaran kegiatannya. Oleh karena itu, Unit Kegiatan yang memiliki andil dalam pencapaian tersebut antara lain Unit Kegiatan Program dan Evaluasi, Unit Kegiatan Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Unit Kegiatan Keuangan dan Umum, serta Unit Kegiatan Hukum dan Kerja Sama Teknis.



**Gambar 2.3 Relasi Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan dengan Unit Kegiatan**

## Unit Kegiatan Program dan Evaluasi

Memahami hal tersebut, seluruh unit kegiatan sepakat bahwa menyelaraskan sasaran unit kegiatan perlu dilakukan demi tertanganinya permasalahan tersebut. Oleh karena itu, seluruh unit kegiatan menetapkan sasaran unit kegiatan dan indikator-indikator yang satu demi memperkuat kekuatan yang dimiliki secara serentak pada seluruh wilayah kehutanan di Indonesia. Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan dari Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan digambarkan pada skema Gambar 2.4.

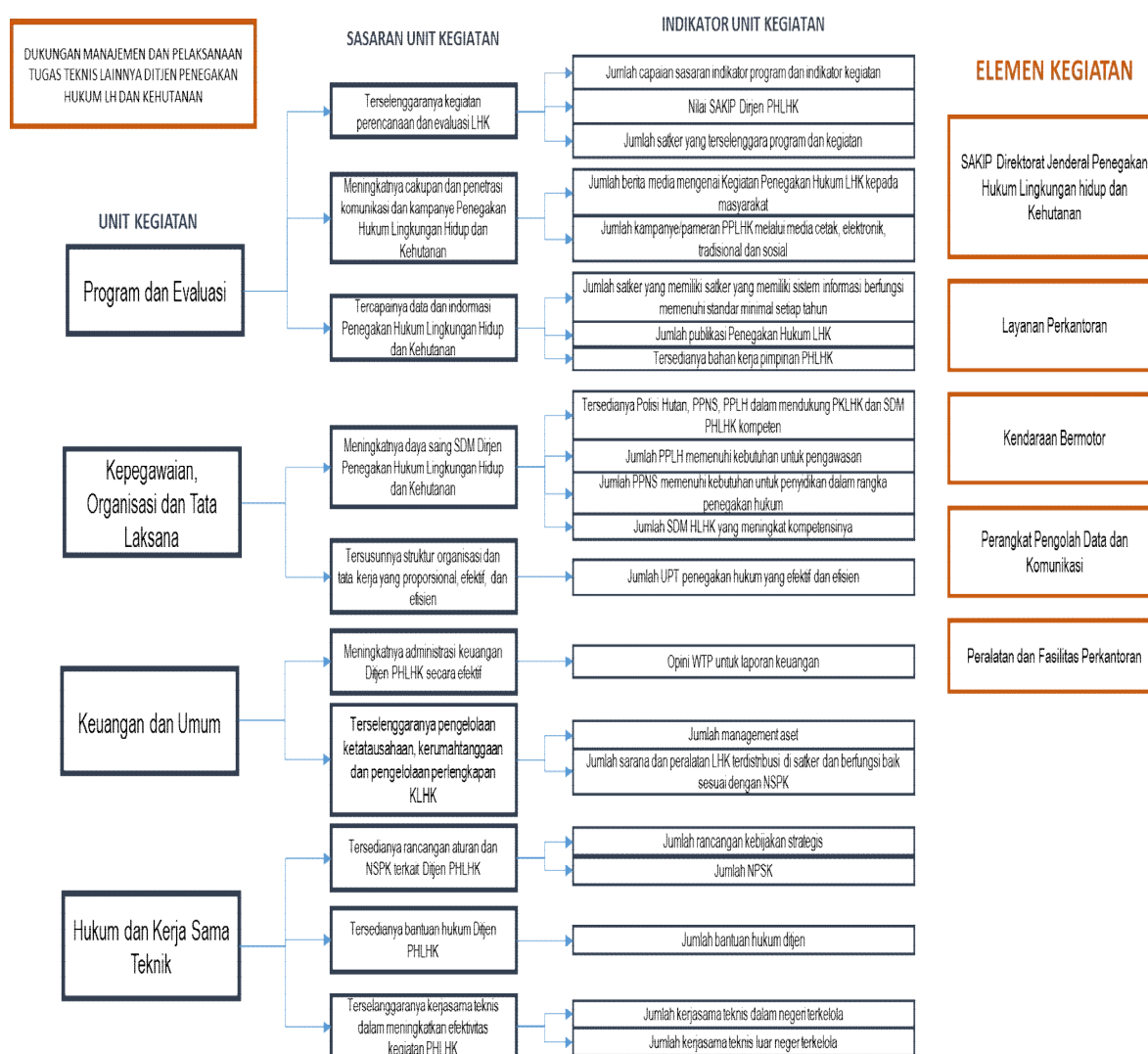


**Gambar 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan Program dan Evaluasi**

## Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan

Seperti halnya Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan yang disusun berdasarkan alur Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan, Penyusunan Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan pada renstra juga mengikuti arah Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan. Meskipun demikian, ketika Unit Kegiatan memiliki peran pada Indikator Kinerja Unit Kegiatan tertentu, Elemen Kegiatan mendukung seluruh indikator secara keseluruhan yang

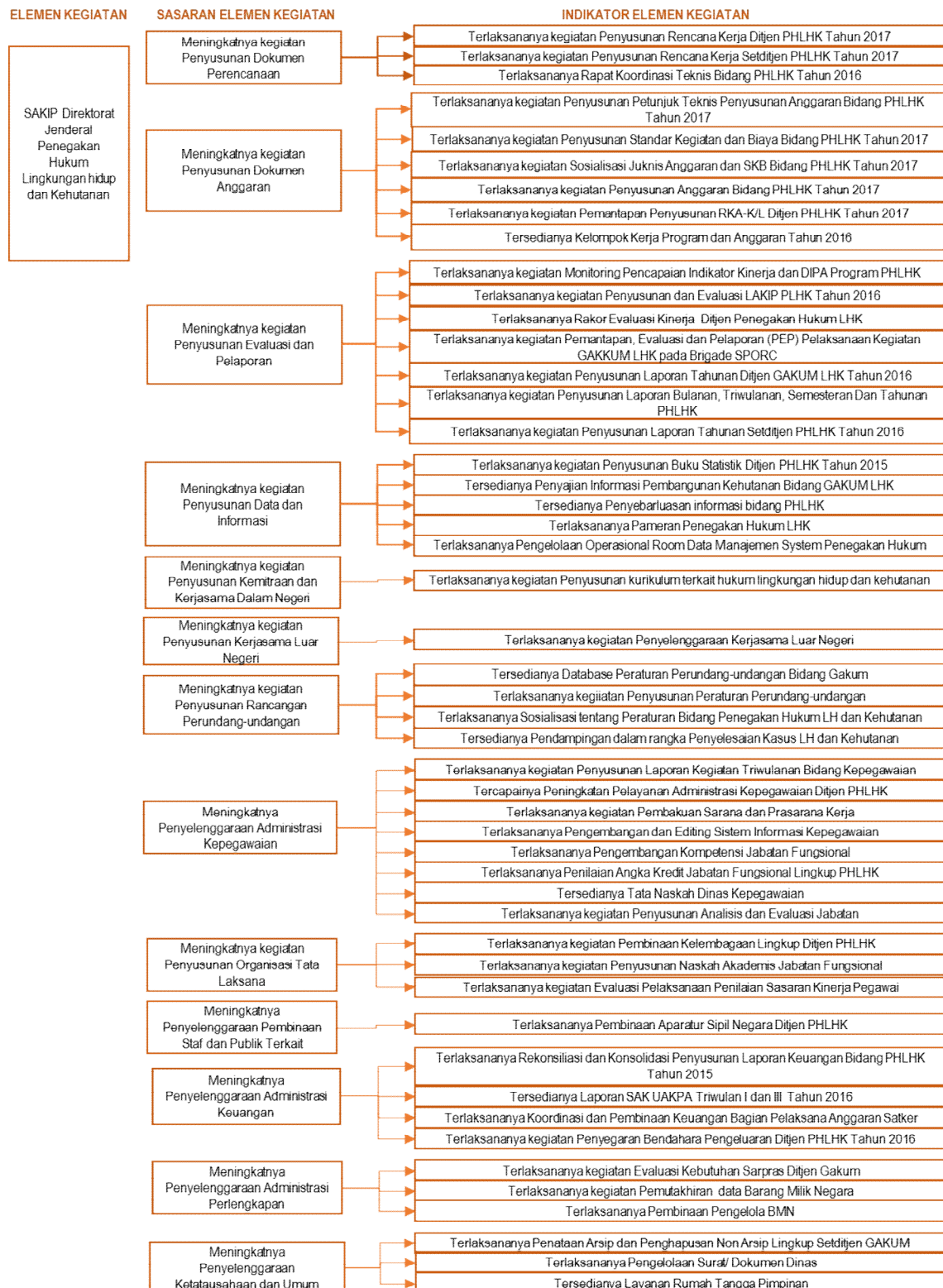
berlaku pada seluruh wilayah Pencegahan dan Pengamanan Hutan. Sehingga, baik wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara, Jawa dan Bali, maupun Sulawesi, Maluku, dan Papua memiliki Elemen kegiatan, Sasaran Elemen Kegiatan, serta Indikator Kinerja Elemen Kegiatan yang seragam antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Sebelum menjabarkan Sasaran dan Indikator Kinerja dari Elemen Kegiatan pada subbab selanjutnya, Elemen Kegiatan dari seluruh Unit Kegiatan diuraikan pada Gambar 2.5. Dari skema tersebut nampak jelas bahwa Elemen Kegiatan terkait erat dengan Sasaran Unit Kegiatan yang telah ditetapkan. Ditambah, adanya elemen dukungan untuk kebutuhan layanan perkantoran.



**Gambar 2.5 Elemen Kegiatan dari Seluruh Unit Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lh Dan Kehutanan**

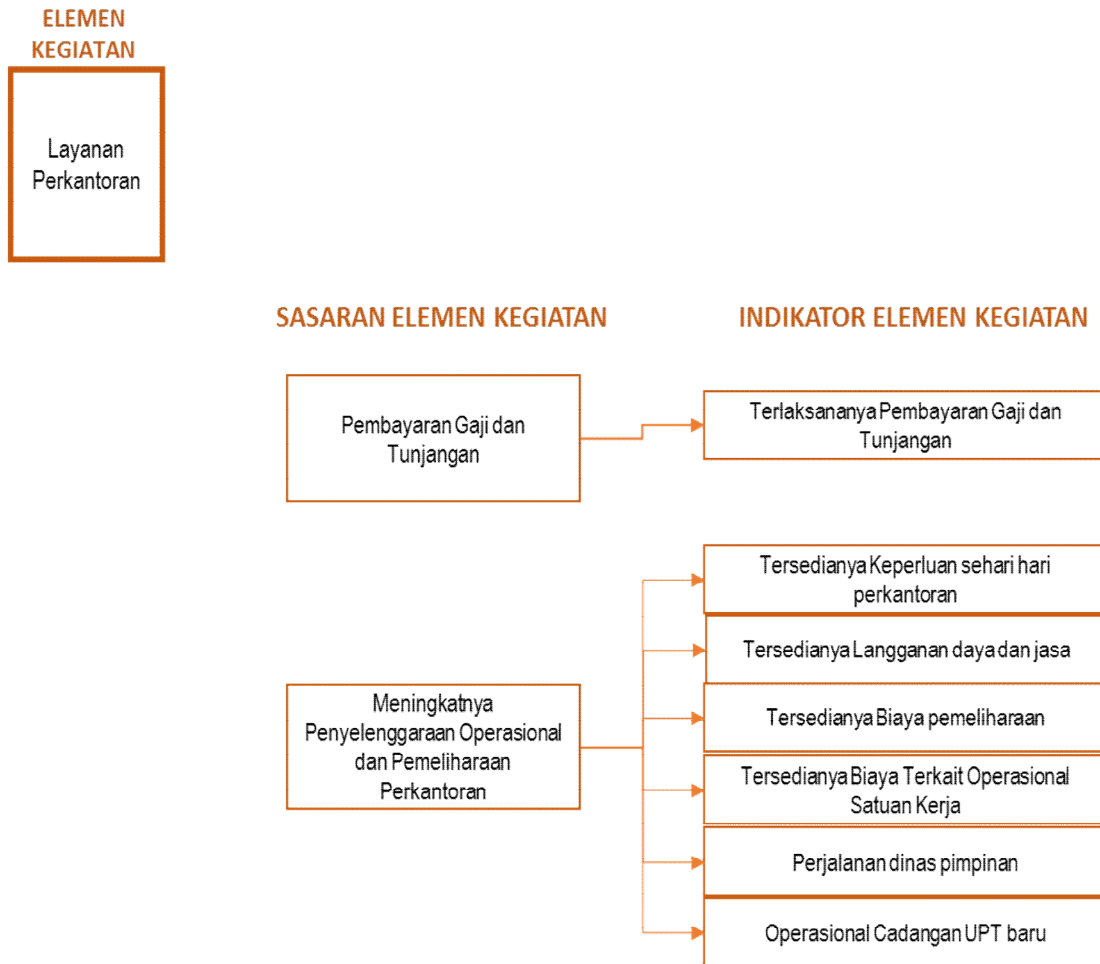


## Elemen Kegiatan SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Gambar 2.5 Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan dari SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

### Elemen Kegiatan Layanan Perkantoran



Gambar 2.6 Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Layanan Perkantoran

### Elemen Kegiatan Kendaraan Bermotor



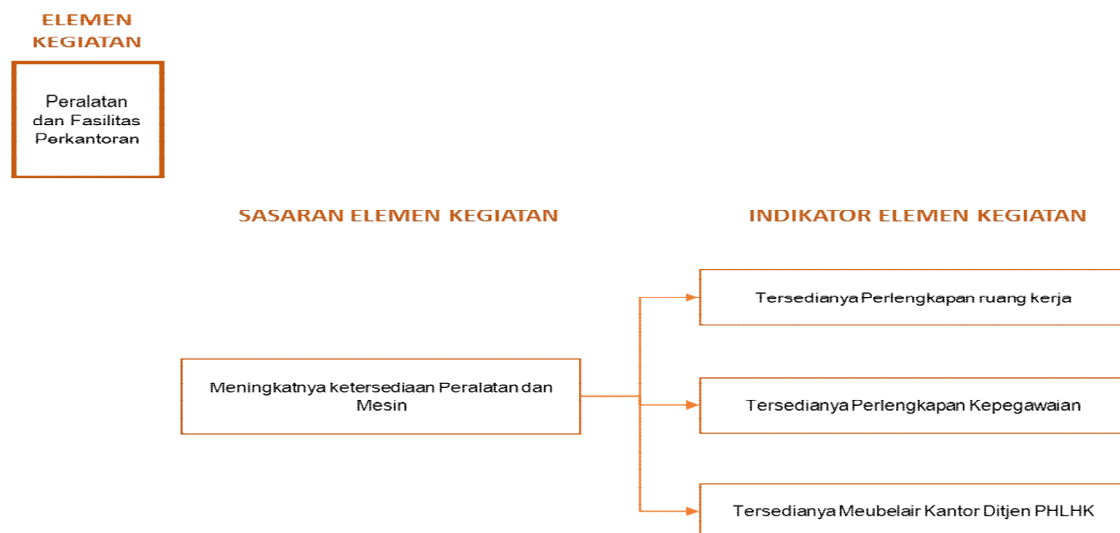
Gambar 2.7 Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Kendaraan Bermotor

### Elemen Kegiatan Pembinaan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan, Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya, dan Pnggiat Lingkungan Lainnya



Gambar 2.8 Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

### Elemen Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pencegahan dan Pengamanan Hutan



Gambar 2.9 Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

### BAB III KERANGKA PENDANAAN

Skenario pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Kegiatan, Program, dan Sasaran Strategis tahun 2015- 2019, diuraikan pada Tabel 3.1. Skenario pendanaan tersebut telah mempertimbangkan segala kegiatan yang dibutuhkan dalam pengembangan baik infrastruktur, sumber daya manusia, maupun hasil evaluasi dari kinerja periode sebelumnya. Pendanaan ini tidak hanya dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi juga dapat diperoleh dari kerjasama baik dari dalam negeri maupun luar negeri selama tidak merugikan pemerintah.

Kebutuhan pendanaan tersebut di susun secara terperinci setiap tahunnya berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan. Kebutuhan dana tahunan tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh unit kerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun melalui delegasi terhadap badan tertentu demi mendukung tercapainya sasaran dan kinerja direktorat ini.

**Tabel 3.1 Kerangka Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

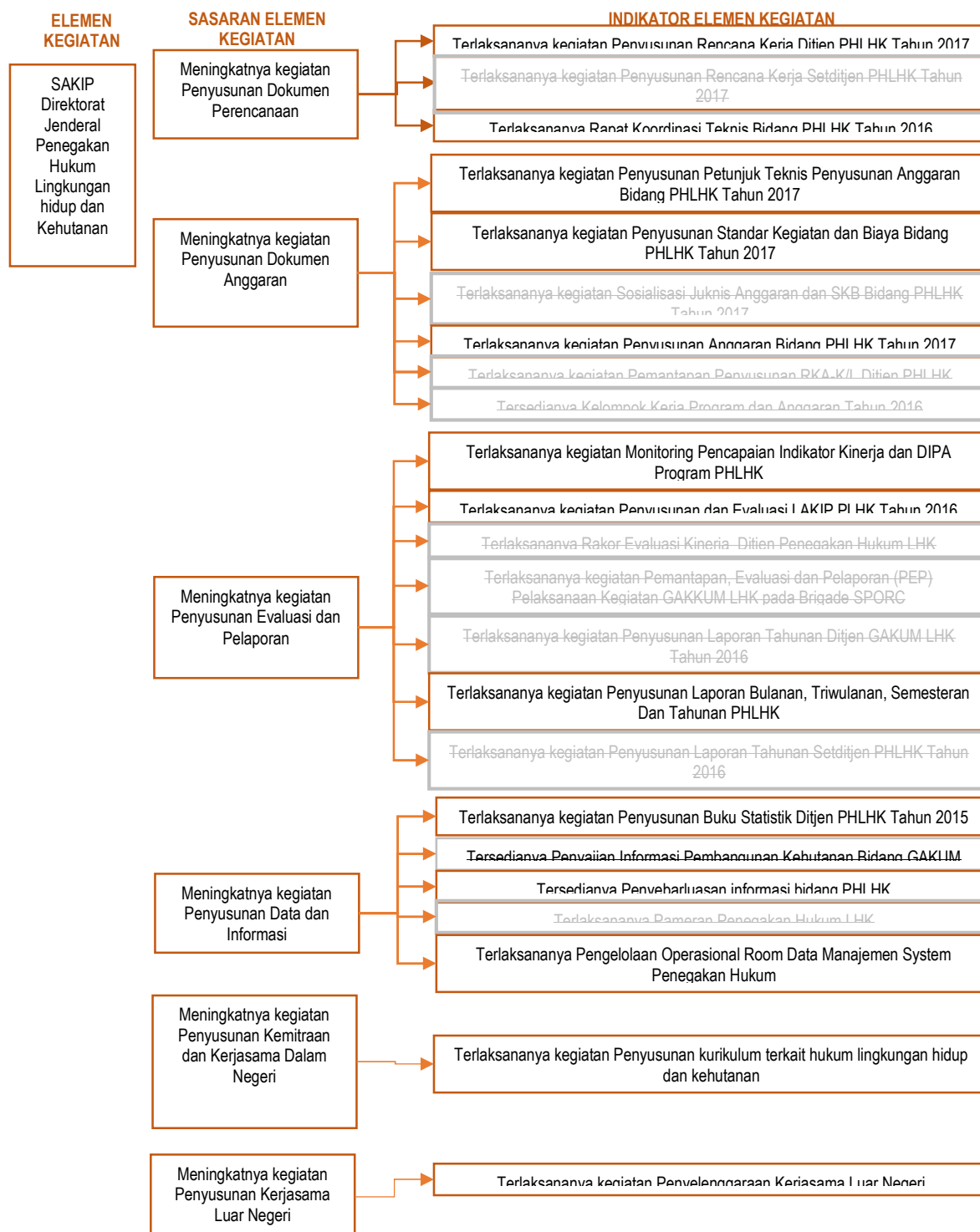
KERANGKA PENDANAAN KEGIATAN					(Rp '000)
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Kegiatan</b>					
Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<b>22,860,000</b>	<b>65,032,518</b>	<b>67,633,398</b>	<b>70,343,552</b>	<b>73,167,835</b>
<b>Unit Kegiatan</b>					
Program dan Evaluasi	5,715,000	3,026,110	3,202,138	3,388,456	3,585,666
Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	5,715,000	2,900,610	3,071,744	3,252,977	3,444,903
Keuangan dan Umum	5,715,000	56,205,190	58,287,772	60,449,142	62,692,365
Hukum dan Kerjasama Teknik	5,715,000	2,900,610	3,071,744	3,252,977	3,444,903
<b>Elemen Kegiatan</b>					
SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan		11,602,438	12,286,976	13,011,908	13,779,610

	Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
	Layanan Perkantoran		48,538,970	50,264,560	52,051,590	53,902,248
	Kendaraan Bermotor		1,369,940	1,423,367	1,478,878	1,536,555
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		125,500	130,394	135,479	140,763
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		3,395,670	3,528,101	3,665,697	3,808,659

## LAMPIRAN A: USULAN PERUBAHAN NOMENKLATUR RENSTRA ESELON II

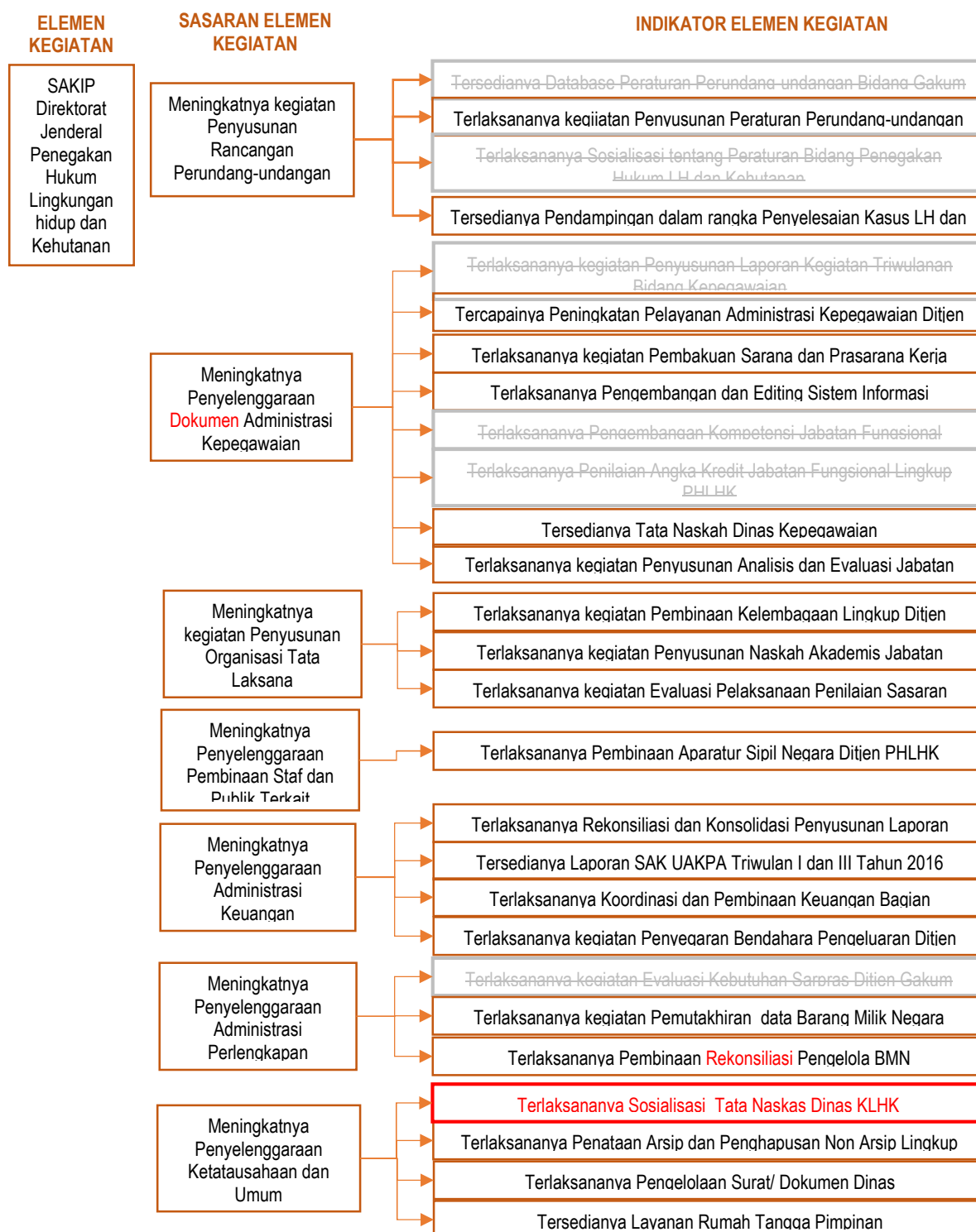
### Elemen Kegiatan:

### SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan



**Elemen Kegiatan:**

**SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**



LAMPIRAN A

**LAMPIRAN A: SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN**

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
<b>Pencegahan dan Pengamanan Hutan (K5)</b>		
Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1.P7.K5)	<b>Program dan Evaluasi (UK1)</b>	
	Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK (S1.P7.K5.UK1.1)	Jumlah capaian sasaran indikator program dan indikator kegiatan (S1.P7.K5.UK1.1.UI1)
		Nilai SAKIP Dirjen PHLHK (S1.P7.K5.UK1.1.UI2)
		Jumlah satker yang terselenggara program dan kegiatan (S1.P7.K5.UK1.1.UI3)
	Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1.P7.K5.UK1.2)	Jumlah berita media mengenai Kegiatan Penegakan Hukum LHK kepada masyarakat (S1.P7.K5.UK1.2.UI1)
		Jumlah kampanye/pameran PPLHK melalui media cetak, elektronik, tradisional dan sosial (S1.P7.K5.UK1.2.UI2)
	Tercapainya data dan Informasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1.P7.K5.UK1.3)	Jumlah satker yang memiliki sistem informasi berfungsi memenuhi standar minimal setiap tahun (S1.P7.K5.UK1.3.UI1)
		Jumlah Publikasi penegakan Hukum LHK (S1.P7.K5.UK1.3.UI2)
		Tersedianya bahan kerja pimpinan PHLHK (S1.P7.K5.UK1.3.UI3)
	<b>Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana (UK2)</b>	
Meningkatnya daya saing SDM Dirjen Penegakan Hukum lingkungan hidup dan kehutanan (S1.P7.K5.UK2.1)	Tersedianya Polisi Hutan, PPNS, PPLH dalam mendukung PHLHK dan SDM PHLHK kompeten (S1.P7.K5.UK2.1.UI1)	
	Jumlah PPLH memenuhi kebutuhan untuk pengawasan (S1.P7.K5.UK2.1.UI2)	



LAMPIRAN A

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
		Jumlah PPNS memenuhi kebutuhan untuk penyidikan dalam rangka penegakan hukum (S1.P7.K5.UK2.1.UI3)
		Jumlah SDM PHLHK yang meningkat kompetensinya (S1.P7.K5.UK2.1.UI4)
	Tersusunnya Struktur Organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif dan efisien (S1.P7.K5.UK2.2)	Jumlah UPT penegakan hukum yang efektif dan efisien (S1.P7.K5.UK2.2.UI1)
	<b>Keuangan dan Umum (UK3)</b>	
	Meningkatnya administrasi keuangan Ditjen PHLHK secara efektif (S1.P7.K5.UK3.1)	Opini WTP untuk laporan keuangan (S1.P7.K5.UK3.1.UI1)
	Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan KLHK (S1.P7.K5.UK3.2)	Jumlah Manajemen Aset (S1.P7.K5.UK3.2.UI1)
		Jumlah sarana dan peralatan LHK terdistribusi di satker dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK (S1.P7.K5.UK3.2.UI2)
	<b>Hukum dan Kerja Sama Teknik (UK4)</b>	
	Tersedianya rancangan aturan dan NSPK terkait ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK4.1)	Jumlah rancangan Kebijakan strategis (S1.P7.K5.UK4.1.UI1)
		Jumlah NSPK (S1.P7.K5.UK4.1.UI2)
	Tersedianya bantuan hukum Ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK4.2)	Jumlah bantuan hukum ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK4.2.UI1)
	Terselenggarakannya kerjasama teknis dalam meningkatkan efektifitas kegiatan PHLHK (S1.P7.K5.UK4.3)	Jumlah kerjasama teknis dalam negeri terkelola (S1.P7.K5.UK4.3.UI1)
		Jumlah kerjasama teknis luar negeri terkelola (S1.P7.K5.UK4.3.UI2)
		Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi ancaman dan gangguan keamanan hutan (S3.P7.K4.UK4.5.UI3)

LAMPIRAN B

**LAMPIRAN B: TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT KEGIATAN**

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN	TARGET					ALOKASI PENDANAAN ('000)					
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>K5:</b> Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan								22,860,000	65,032,518	67,633,393	70,343,552	73,167,835	
<u>S1.P7.K5:</u> Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan								5,715,000	3,026,110	3,202,138	3,388,456	3,585,666	
	<b>UK1:</b> Program dan Evaluasi	<u>S1.P7.K5.UK1.1:</u> Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK											
		<u>S1.P7.K5.UK1.1.UI1:</u> Jumlah capaian sasaran indikator program dan indikator kegiatan	95%	95%	95%	95%	95%						
		<u>S1.P7.K5.UK1.1.UI2:</u> Nilai SAKIP Dirjen PHLHK	70	72	74	76	78						
		<u>S1.P7.K5.UK1.1.UI3:</u> Jumlah satker yang terselenggara program dan kegiatan	52	78	10	10	10						
		<u>S1.P7.K5.UK1.2:</u> Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye Penegakan Hukum Lingkungan Hidup											
		<u>S1.P7.K5.UK1.2.UI1:</u> Jumlah berita media mengenai Kegiatan Penegakan Hukum LHK kepada masyarakat	60	80	100	110	120						
		<u>S1.P7.K5.UK1.2.UI2:</u> Jumlah kampanye/pameran	12	12	12	12	12						

LAMPIRAN B

	dan Kehutanan	PPLHK melalui media cetak, elektronik, tradisional dan social											
	S1.P7.K5.UK1.3: Tercapainya data dan Informasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	S1.P7.K5.UK1.3.UI1: Jumlah satker yang memiliki sistem informasi berfungsi memenuhi standar minimal setiap tahun	1	1	10	10	10						
		S1.P7.K5.UK1.3.UI2: Jumlah Publikasi penegakan Hukum LHK	80	85	90	95	100						
		S1.P7.K5.UK1.3.UI3: Tersedianya bahan kerja pimpinan PHLHK	12	12	12	12	12						
	<b>UK2: Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana</b>							5,715,000	2,900,610	3,071,744	3,252,977	3,444,903	
	S1.P7.K5.UK2.1: Meningkatnya daya saing SDM Dirjen Penegakan Hukum lingkungan hidup dan kehutanan	S1.P7.K5.UK2.1.UI1: Tersedianya Polisi Hutan, PPNS, PPLH dalam mendukung PHLHK dan SDM PHLHK kompeten	3175	3225	3275	3325	3375						
		S1.P7.K5.UK2.1.UI2: Jumlah PPLH memenuhi kebutuhan untuk pengawasan	138	188	238	288	338						
		S1.P7.K5.UK2.1.UI3: Jumlah PPNS	154	204	254	304	354						

LAMPIRAN B

		memenuhi kebutuhan untuk penyidikan dalam rangka penegakan hukum										
		<u>S1.P7.K5.UK2.1.UI4:</u> Jumlah SDM PHLHK yang meningkat kompetensinya	208	238	268	298	328					
	<u>S1.P7.K5.UK2.2:</u> Tersusunnya Struktur Organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif dan efisien	<u>S1.P7.K5.UK2.2.UI1:</u> Jumlah UPT penegakan hukum yang efektif dan efisien	51	77	5	5	5					
	<b>UK3:</b> <b>Keuangan dan Umum</b>							5,715,000	56,205,190	58,287,772	60,449,142	62,692,365
	<u>S1.P7.K5.UK3.1:</u> Meningkatnya administrasi keuangan Ditjen PHLHK secara efektif	<u>S1.P7.K5.UK3.1.UI1:</u> Opini WTP untuk laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
	<u>S1.P7.K5.UK3.2:</u> Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan KLHK	<u>S1.P7.K5.UK3.2.UI1:</u> Jumlah Manajemen Aset										
		<u>S1.P7.K5.UK3.2.UI2:</u> Jumlah sarana dan peralatan LHK terdistribusi di satker dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK										
	<b>UK4:</b> <b>Hukum dan Kerjasama Teknik</b>							5,715,000	2,900,610	3,071,744	3,252,977	3,444,903

LAMPIRAN B

	<u>S1.P7.K5.UK4.1:</u> Tersedianya rancangan aturan dan NSPK terkait ditjen PHLHK	<u>S1.P7.K5.UK4.1.UI1:</u> Jumlah rancangan Kebijakan strategis	2	2	2	2	2					
		<u>S1.P7.K5.UK4.1.UI2:</u> Jumlah NSPK	5	5	5	5	5					
	<u>S1.P7.K5.UK4.2:</u> Tersedianya bantuan hukum Ditjen PHLHK	<u>S1.P7.K5.UK4.2.UI1:</u> Jumlah bantuan hukum ditjen PHLHK	5	5	7	8	10					
	<u>S1.P7.K5.UK4.3:</u> Terselenggaranya kerjasama teknis dalam meningkatkan efektifitas kegiatan PHLHK	<u>S1.P7.K5.UK4.3.UI1:</u> Jumlah kerjasama teknis dalam negeri terkelola	1	2	3	3	4					
		<u>S1.P7.K5.UK4.3.UI2:</u> Jumlah kerjasama teknis luar negeri terkelola	2	3	4	5	5					

LAMPIRAN C

**LAMPIRAN C: SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN**

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN
<b>Program dan Evaluasi (UK1), Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (UK2), Keuangan dan Umum (UK3), Hukum dan Kerja Sama Teknik (UK4)</b>		
<b>SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan (EK1)</b>		
Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK (S1.P7.K5.UK1.1)	<b>Lokasi dilaksanakannya Pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi (EK1)</b>	
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.1)	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Ditjen PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.1.EI1)
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Setditjen PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.1.EI2)
		Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Bidang PHLHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.1.EI3)
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.2)	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Bidang PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.2.EI1)
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya Bidang PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.2.EI2)
		Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Juknis Anggaran dan SKB Bidang PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.2.EI3)
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Anggaran Bidang PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.2.EI4)
		Terlaksananya kegiatan Pemantapan Penyusunan RKA-K/L Ditjen PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.2.EI5)
		Tersedianya Kelompok Kerja Program dan Anggaran Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.2.EI6)

LAMPIRAN C

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.3)	Terlaksananya kegiatan Monitoring Pencapaian Indikator Kinerja dan DIPA Program PHLHK (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.3.EI1) Terlaksananya kegiatan Penyusunan dan Evaluasi LAKIP PLHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.3.EI2) Terlaksananya Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen Penegakan Hukum LHK (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.3.EI3) Terlaksananya kegiatan Pemantapan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan Kegiatan GAKKUM LHK pada Brigade SPORC (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.3.EI4) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen GAKUM LHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.3.EI5) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan PHLHK (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.3.EI6) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Setditjen PHLHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.3.EI7)
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Data dan Informasi (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.4)	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Buku Statistik Ditjen PHLHK Tahun 2015 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.4.EI1) Tersedianya Penyajian Informasi Pembangunan Kehutanan Bidang GAKUM LHK (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.4.EI2) Tersedianya Penyebarluasan informasi bidang PHLHK (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.4.EI3) Terlaksananya Pameran Penegakan Hukum LHK (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.4.EI4) Terlaksananya Pengelolaan Operasional Room Data Manajemen System Penegakan Hukum (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.4.EI5)
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Kemitraan dan	Terlaksananya kegiatan Penyusunan kurikulum terkait hukum lingkungan hidup dan kehutanan (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.5.EI1)

LAMPIRAN C

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN
	Kerjasama Dalam Negeri (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.5)	
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Kerjasama Luar Negeri (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.6)	Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.EI1)
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Rancangan Perundang-undangan (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.7)	Tersedianya Database Peraturan Perundang-undangan Bidang Gakum (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.7.EI1)
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.7.EI2)
		Terlaksananya Sosialisasi tentang Peraturan Bidang Penegakan Hukum LH dan Kehutanan (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.7.EI3)
		Tersedianya Pendampingan dalam rangka Penyelesaian Kasus LH dan Kehutanan (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.7.EI4)
	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.8)	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Triwulanan Bidang Kepegawaian (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.8.EI1)
		Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.8.EI2)
		Terlaksananya kegiatan Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.8.EI3)
		Terlaksananya Pengembangan dan Editing Sistem Informasi Kepegawaian (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.8.EI4)
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.8.EI5)
		Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup PHLHK (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.8.EI6)



LAMPIRAN C

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN
		Tersedianya Tata Naskah Dinas Kepegawaian (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.8.EI7)
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Analisis dan Evaluasi Jabatan (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.8.EI8)
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Organisasi Tata Laksana (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.9)	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kelembagaan Lingkup Ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.9.EI1)
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Jabatan Fungsional (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.9.EI2)
		Terlaksananya kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.9.EI3)
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Staf dan Publik Terkait (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.10)	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Sipil Negara Ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.10.EI1)
	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.11)	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bidang PHLHK Tahun 2015 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.11.EI1)
		Tersedianya Laporan SAK UAKPA Triwulan I dan III Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.11.EI2)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Keuangan Bagian Pelaksana Anggaran Satker (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.11.EI3)
		Terlaksananya kegiatan Penyegaran Bendahara Pengeluaran Ditjen PHLHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.11.EI4)
	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perlengkapan (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.12)	Terlaksananya kegiatan Evaluasi Kebutuhan Sarpras Ditjen Gakum (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.12.EI1)
		Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran data Barang Milik Negara (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.12.EI2)

LAMPIRAN C

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN
		Terlaksananya Pembinaan Pengelola BMN (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.12.EI3)
	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Umum (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.13)	Terlaksananya Penataan Arsip dan Penghapusan Non Arsip Lingkup Setditjen GAKUM (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.13.EI1)
		Terlaksananya Pengelolaan Surat/ Dokumen Dinas (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.13.EI2)
		Tersedianya Layanan Rumah Tangga Pimpinan (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.13.EI3)
	<b>Layanan Perkantoran (EK2)</b>	
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan (S1.P7.K5.UK1.1.EK2.1)	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan (S1.P7.K5.UK1.1.EK2.1.EI1)
	Meningkatnya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (S1.P7.K5.UK1.1.EK2.2)	Tersedianya Keperluan sehari hari perkantoran (S1.P7.K5.UK1.1.EK2.2.EI1)
		Tersedianya Langganan daya dan jasa (S1.P7.K5.UK1.1.EK2.2.EI2)
		Tersedianya Biaya pemeliharaan (S1.P7.K5.UK1.1.EK2.2.EI3)
		Tersedianya Biaya Terkait Operasional Satuan Kerja (S1.P7.K5.UK1.1.EK2.2.EI4)
		Perjalanan dinas pimpinan (S1.P7.K5.UK1.1.EK2.2.EI5)
		Operasional Cadangan UPT baru (S1.P7.K5.UK1.1.EK2.2.EI6)
	<b>Kendaraan Bermotor (EK3)</b>	
	Meningkatnya jumlah Peralatan dan Mesin (S1.P7.K5.UK1.1.EK3)	Tersedianya Kendaraan operasional Ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK1.1.EK3.EI1)
	<b>Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (EK4)</b>	
	Meningkatnya ketersediaan Data dan Informasi (S1.P7.K5.UK1.1.EK4)	Tersedianya Perangkat pengolah data (S1.P7.K5.UK1.1.EK4.EI1)

LAMPIRAN C

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN
	<b>Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (EK5)</b>	
	Meningkatnya ketersediaan Peralatan dan Mesin (S1.P7.K5.UK1.1.EK5)	Tersedianya Perlengkapan ruang kerja (S1.P7.K5.UK1.1.EK5.EI1)
		Tersedianya Perlengkapan Kepegawaian (S1.P7.K5.UK1.1.EK5.EI2)
		Tersedianya Meubelair Kantor Ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK1.1.EK5.EI3)

LAMPIRAN D

**LAMPIRAN D: TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN ELEMEN KEGIATAN**

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Program dan Evaluasi (UK1)</b>								5,715,000	16,383,630	17,038,742	17,721,367	18,417,459
<b>SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan (EK1)</b>								5,715,000	2,900,610	3,071,744	3,252,977	3,444,903
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.1)	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Ditjen PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.1.EI1)						290,061	307,174	325,298	344,490	290,061
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Setditjen PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.1.EI2)										
		Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Bidang PHLHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.1.EI3)										
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.1)	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Bidang PHLHK Tahun 2017						377,079	399,327	422,887	447,837	377,079



LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)												
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019								
	kegiatan Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.3)	Monitoring Pencapaian Indikator Kinerja dan DIPA Program PHLHK (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.3.EI1) Terlaksananya kegiatan Penyusunan dan Evaluasi LAKIP PLHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.3.EI2) Terlaksananya Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen Penegakan Hukum LHK (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.3.EI3) Terlaksananya kegiatan Pemantapan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan Kegiatan GAKKUM LHK pada Brigade SPORC (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.3.EI4) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen GAKKUM LHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.3.EI5) Terlaksananya kegiatan																		

LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)							
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan PHLHK (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.3.EI6)													
		Tersedianya kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Setditjen PHLHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.3.EI7)													
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Data dan Informasi (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.4)	Tersedianya kegiatan Penyusunan Buku Statistik Ditjen PHLHK Tahun 2015 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.4.EI1)										391,582	414,685	439,152	465,062
		Tersedianya Penyajian Informasi Pembangunan Kehutanan Bidang GAKUM LHK (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.4.EI2)													
		Tersedianya Penyebarluasan informasi bidang PHLHK (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.4.EI3)													
		Tersedianya Pameran Penegakan Hukum LHK													





LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target						Rencana Alokasi (Rp '000)						
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		Perundang-undangan (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.7.EI2)													
		Terlaksananya Sosialisasi tentang Peraturan Bidang Penegakan Hukum LH dan Kehutanan (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.7.EI3)													
		Tersedianya Pendampingan dalam rangka Penyelesaian Kasus LH dan Kehutanan (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.7.EI4)													
	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.8)	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Triwulanan Bidang Kepegawaian (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.8.EI1)										261,055	276,457	292,768	310,041
		Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.8.EI2)													
		Terlaksananya kegiatan Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.8.EI3)													
		Terlaksananya													



LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)												
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019								
		Akademis Jabatan Fungsional (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.9.EI2)																		
		Terlaksananya kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.9.EI3)																		
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Staf dan Publik Terkait (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.10)	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Sipil Negara Ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.10.EI1)											269,757			285,672	302,527	320,376		
	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.11)	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bidang PHLHK Tahun 2015 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.11.EI1)															232,049	245,740	260,238	275,592
		Tersedianya Laporan SAK UAKPA Triwulan I dan III Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.11.EI2)																		
		Terlaksananya Koordinasi																		

LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)							
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		dan Pembinaan Keuangan Bagian Pelaksana Anggaran Satker (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.11.EI3)													
		Terlaksananya kegiatan Penyebaran Bendahara Pengeluaran Ditjen PHLHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.11.EI4)													
	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perlengkapan (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.12)	Terlaksananya kegiatan Evaluasi Kebutuhan Sarpras Ditjen Gakum (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.12.EI1)									188,540	199,663	211,444	223,919	
		Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran data Barang Milik Negara (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.12.EI2)													
		Terlaksananya Pembinaan Pengelola BMN (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.12.EI3)													
	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Umum (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.13)	Terlaksananya Penataan Arsip dan Penghapusan Non Arsip Lingkup Setditjen GAKUM (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.13.EI1)									348,073	368,609	390,357	413,388	

LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)										
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
	13)	Terlaksananya Pengelolaan Surat/ Dokumen Dinas (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.13.EI2)																
		Tersedianya Layanan Rumah Tangga Pimpinan (S1.P7.K5.UK1.1.EK1.13.EI3)																
<b>Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (EK2)</b>																		
	Meningkatnya ketersediaan Data dan Informasi (S1.P7.K5.UK1.1.EK2)	Tersedianya Perangkat pengolah data (S1.P7.K5.UK1.1.EK2.EI1)																
<b>Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana (UK2)</b>																		
<b>SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan (EK1)</b>																		
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.1)	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Ditjen PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.1.EI1)																
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Setditjen PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.1.EI2)																

LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)									
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
		Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Bidang PHLHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.1.EI3)															
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.2)	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Bidang PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.2.EI1)										377,079	399,327	422,887	447,837	377,079	
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya Bidang PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.2.EI2)															
		Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Juknis Anggaran dan SKB Bidang PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.2.EI3)															
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Anggaran Bidang PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.2.EI4)															
		Terlaksananya kegiatan															

LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)							
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		Pemantapan Penyusunan RKA-K/L Ditjen PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.2.EI5)													
		Tersedianya Kelompok Kerja Program dan Anggaran Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.2.EI6)													
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.3)	Terlaksananya kegiatan Monitoring Pencapaian Indikator Kinerja dan DIPA Program PHLHK (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.3.EI1)									232,049	245,740	260,238	275,592	
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan dan Evaluasi LAKIP PLHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.3.EI2)													
		Terlaksananya Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen Penegakan Hukum LHK (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.3.EI3)													
		Terlaksananya kegiatan Pemantapan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan Kegiatan													

LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)											
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019							
		GAKKUM LHK pada Brigade SPORC (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.3.EI4)																	
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen GAKUM LHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.3.EI5)																	
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan PHLHK (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.3.EI6)																	
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Setditjen PHLHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.3.EI7)																	
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Data dan Informasi (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.4)	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Buku Statistik Ditjen PHLHK Tahun 2015 (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.4.EI1)														391,582	414,685	439,152	465,062
		Tersedianya Penyajian Informasi Pembangunan																	



LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target						Rencana Alokasi (Rp '000)						
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		Kehutanan Bidang GAKUM LHK (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.4.EI2)													
		Tersedianya Penyebarluasan informasi bidang PHLHK (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.4.EI3)													
		Terlaksananya Pameran Penegakan Hukum LHK (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.4.EI4)													
		Terlaksananya Pengelolaan Operasional Room Data Manajemen System Penegakan Hukum (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.4.EI5)													
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Kemitraan dan Kerjasama Dalam Negeri (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.5)	Terlaksananya kegiatan Penyusunan kurikulum terkait hukum lingkungan hidup dan kehutanan (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.5.EI1)										58,012	61,435	65,060	68,898
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Kerjasama Luar	Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri										145,030	153,587	162,649	172,245

LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target						Rencana Alokasi (Rp '000)								
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
	Negeri (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.6)	(S1.P7.K5.UK2.1.EK1.6.E1)															
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Rancangan Perundang-undangan (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.7)	Tersedianya Database Peraturan Perundang-undangan Bidang Gakum (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.7.E1) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.7.E2)										159,534	168,946	178,914	189,470		
		Terlaksananya Sosialisasi tentang Peraturan Bidang Penegakan Hukum LH dan Kehutanan (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.7.E3)															
		Tersedianya Pendampingan dalam rangka Penyelesaian Kasus LH dan Kehutanan (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.7.E4)															
	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.8)	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Triwulanan Bidang Kepegawaian (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.8.E1)										261,055	276,457	292,768	310,041		

LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)								
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
8)		Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.8.EI2)														
		Terlaksananya kegiatan Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.8.EI3)														
		Terlaksananya Pengembangan dan Editing Sistem Informasi Kepegawaian (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.8.EI4)														
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.8.EI5)														
		Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PHLHK (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.8.EI6)														
		Tersedianya Tata Naskah Dinas Kepegawaian (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.8.EI7)														
		Terlaksananya kegiatan														

LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target						Rencana Alokasi (Rp '000)									
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
		Penyusunan Analisis dan Evaluasi Jabatan (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.8.EI8)																
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Organisasi Tata Laksana (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.9)	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kelembagaan Lingkup Ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.9.EI1)										116,024	122,870	130,119	137,796			
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Jabatan Fungsional (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.9.EI2)																
		Terlaksananya kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.9.EI3)																
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Staf dan Publik Terkait (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.10)	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Sipil Negara Ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.10.EI1)										269,757	285,672	302,527	320,376			
	Meningkatnya Penyelenggaraan	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Konsolidasi										232,049	245,740	260,238	275,592			

LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)							
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Administrasi Keuangan (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.11)	Penyusunan Laporan Keuangan Bidang PHLHK Tahun 2015 (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.11.E11)													
		Tersedianya Laporan SAK UAKPA Triwulan I dan III Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.11.E12)													
		Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Keuangan Bagian Pelaksana Anggaran Satker (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.11.E13)													
		Terlaksananya kegiatan Penyebaran Bendahara Pengeluaran Ditjen PHLHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.11.E14)													
	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perlengkapan (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.12)	Terlaksananya kegiatan Evaluasi Kebutuhan Sarpras Ditjen Gakum (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.12.E11)											188,540	199,663	211,444
		Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran data Barang Milik Negara													223,919

LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target						Rencana Alokasi (Rp '000)											
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019								
		(S1.P7.K5.UK2.1.EK1.12.EI2)																		
		Terlaksananya Pembinaan Pengelola BMN (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.12.EI3)																		
	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Umum (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.13)	Terlaksananya Penataan Arsip dan Penghapusan Non Arsip Lingkup Setdijten GAKUM (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.13.EI1)														348,073	368,609	390,357	413,388	
		Terlaksananya Pengelolaan Surat/ Dokumen Dinas (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.13.EI2)																		
		Tersedianya Layanan Rumah Tangga Pimpinan (S1.P7.K5.UK2.1.EK1.13.EI3)																		
<b>Keuangan dan Umum (UK3)</b>															5,715,000	56,205,190	58,287,772	60,449,142	62,692,365	
<b>SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan (EK1)</b>															5,715,000	2,900,610	3,071,744	3,252,977	3,444,903	
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.1)	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Ditjen PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.1.EI1)														290,061	307,174	325,298	344,490	290,061
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Rencana Kerja																		



LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)							
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		Bidang PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.2.EI4)													
		Terlaksananya kegiatan Pemanjapan Penyusunan RKA-K/L Ditjen PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.2.EI5)													
		Tersedianya Kelompok Kerja Program dan Anggaran Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.2.EI6)													
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.3)	Terlaksananya kegiatan Monitoring Pencapaian Indikator Kinerja dan DIPA Program PHLHK (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.3.EI1)										232,049	245,740	260,238	275,592
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan dan Evaluasi LAKIP PLHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.3.EI2)													
		Terlaksananya Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen Penegakan Hukum LHK (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.3.EI3)													
		Terlaksananya kegiatan													



LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)										
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
		Pemantapan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP)																
		Pelaksanaan Kegiatan GAKKUM LHK pada Brigade SPORC (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.3.EI4)																
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen GAKUM LHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.3.EI5)																
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan PHLHK (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.3.EI6)																
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Setditjen PHLHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.3.EI7)																
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Data dan Informasi	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Buku Statistik Ditjen PHLHK Tahun 2015													391,582	414,685	439,152	465,062



LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target						Rencana Alokasi (Rp '000)						
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Kerjasama Luar Negeri (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.6)	Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.6.EI1)										145,030	153,587	162,649	172,245
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Rancangan Perundang-undangan (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.7)	Tersedianya Database Peraturan Perundang-undangan Bidang Gakum (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.7.EI1) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.7.EI2)										159,534	168,946	178,914	189,470
	Meningkatnya Penyelenggaraan (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.7.EI4)	Terlaksananya kegiatan Pendampingan dalam rangka Penyelesaian Kasus LH dan Kehutanan (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.7.EI4)													
	Meningkatnya Penyelenggaraan	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan										261,055	276,457	292,768	310,041

LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)										
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
	Administrasi Kepegawaian (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.8)	Kegiatan Triwulanan Bidang Kepegawaian (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.8.EI1)																
		Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.8.EI2)																
		Terselenggaranya kegiatan Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.8.EI3)																
		Terselenggaranya Pengembangan dan Editing Sistem Informasi Kepegawaian (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.8.EI4)																
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.8.EI5)																
		Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup PHLHK (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.8.EI6)																
		Tersedianya Tata Naskah																



LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target						Rencana Alokasi (Rp '000)									
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
	10)																	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.11)	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bidang PHLHK Tahun 2015 (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.11.E11)													232,049	245,740	260,238	275,592
		Tersedianya Laporan SAK UAKPA Triwulan I dan III Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.11.E12)																
		Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Keuangan Bagian Pelaksana Anggaran Satker (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.11.E13)																
		Terlaksananya kegiatan Penyebaran Bendahara Pengeluaran Ditjen PHLHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK3.1.EK1.11.E14)																
	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi	Terlaksananya kegiatan Evaluasi Kebutuhan Sarpras Ditjen Gakum													188,540	199,663	211,444	223,919



LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target						Rencana Alokasi (Rp '000)							
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
	Meningkatnya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (S1.P7.K5.UK3.1.EK2.2) 2)	Tersedianya Keperluan sehari hari perkantoran (S1.P7.K5.UK1.1.EK2.2.EI1)										6,681,861	7,037,038	7,287,223	7,546,315	
		Tersedianya Langganan daya dan jasa (S1.P7.K5.UK3.1.EK2.2.EI2)														
		Tersedianya Biaya pemeliharaan (S1.P7.K5.UK3.1.EK2.2.EI3)														
		Tersedianya Biaya Terkait Operasional Satuan Kerja (S1.P7.K5.UK3.1.EK2.2.EI4)														
		Perjalanan dinas pimpinan (S1.P7.K5.UK3.1.EK2.2.EI5)														
		Operasional Cadangan UPT baru (S1.P7.K5.UK3.1.EK2.2.EI6)														
	<b>Kendaraan Bermotor (EK3)</b>											<b>1,369,940</b>	<b>1,423,367</b>	<b>1,478,878</b>	<b>1,536,555</b>	
	Meningkatnya jumlah Peralatan dan Mesin (S1.P7.K5.UK3.1.EK3)	Tersedianya Kendaraan operasional Ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK3.1.EK3.EI1)										1,369,940	1,423,367	1,478,878	1,536,555	
	<b>Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (EK4)</b>											<b>3,395,6</b>	<b>3,528,1</b>	<b>3,665,6</b>	<b>3,808,65</b>	





LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)							
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		Koordinasi Teknis Bidang PHLHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.1.EI3)													
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.2)	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Bidang PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.2.EI1)									377,079	399,327	422,887	447,837	377,079
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya Bidang PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.2.EI2)													
		Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Juknis Anggaran dan SKB Bidang PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.2.EI3)													
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Anggaran Bidang PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.2.EI4)													
		Terlaksananya kegiatan Pemantapan Penyusunan													

LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)							
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		RKA-K/L Ditjen PHLHK Tahun 2017 (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.2.EI5)													
		Tersedianya Kelompok Kerja Program dan Anggaran Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.2.EI6)													
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.3)	Terlaksananya kegiatan Monitoring Pencapaian Indikator Kinerja dan DIPA Program PHLHK (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.3.EI1)										232,049	245,740	260,238	275,592
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan dan Evaluasi LAKIP PLHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.3.EI2)													
		Terlaksananya Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen Penegakan Hukum LHK (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.3.EI3)													
		Terlaksananya kegiatan Pemantapan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan Kegiatan GAKKUM LHK pada Brigade													

LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)								
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
		SPORC (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.3.EI4)														
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen GAKUM LHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.3.EI5)														
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan PHLHK (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.3.EI6)														
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Setditjen PHLHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.3.EI7)														
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Buku Statistik Ditjen PHLHK Tahun 2015 (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.4.EI1)											391,582	414,685	439,152	465,062
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Data dan Informasi (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.4)	Tersedianya Penyajian Informasi Pembangunan Kehutanan Bidang GAKUM														



LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target						Rencana Alokasi (Rp '000)									
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
	(S1.P7.K5.UK4.1.EK1.6)																	
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Rancangan Perundang-undangan (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.7)	Tersedianya Database Peraturan Perundang-undangan Bidang Gakum (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.7.E11) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.7.E12)											159,534	168,946	178,914	189,470		
		Tertindakannya Sosialisasi tentang Peraturan Bidang Pengawasan Hukum LH dan Kehutanan (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.7.E13) Tersedianya Pendampingan dalam rangka Penyelesaian Kasus LH dan Kehutanan (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.7.E14)																
	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.8)	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Triwulanan Bidang Kepegawaian (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.8.E11)											261,055	276,457	292,768	310,041		

LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)								
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
	8)	Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.8.EI2)														
		Terlaksananya kegiatan Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.8.EI3)														
		Terlaksananya Pengembangan dan Editing Sistem Informasi Kepegawaian (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.8.EI4)														
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.8.EI5)														
		Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PHLHK (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.8.EI6)														
		Tersedianya Tata Naskah Dinas Kepegawaian (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.8.EI7)														
		Terlaksananya kegiatan														

LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target						Rencana Alokasi (Rp '000)									
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
		Penyusunan Analisis dan Evaluasi Jabatan (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.8.EI8)																
	Meningkatnya kegiatan Penyusunan Organisasi Tata Laksana (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.9)	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kelembagaan Lingkup Ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.9.EI1)										116,024	122,870	130,119	137,796			
		Terlaksananya kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Jabatan Fungsional (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.9.EI2)																
		Terlaksananya kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.9.EI3)																
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Staf dan Publik Terkait (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.10)	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Sipil Negara Ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.10.EI1)										269,757	285,672	302,527	320,376			
	Meningkatnya Penyelenggaraan	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Konsolidasi										232,049	245,740	260,238	275,592			




LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target						Rencana Alokasi (Rp '000)									
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
	Administrasi Keuangan (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.11)	Penyusunan Laporan Keuangan Bidang PHLHK Tahun 2015 (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.11.E1)																
		Tersedianya Laporan SAK UAKPA Triwulan I dan III Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.11.E2)																
	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perlengkapan (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.12)	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Keuangan Bagian Pelaksana Anggaran Satker (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.11.E3)																
		Terlaksananya kegiatan Penyebaran Bendahara Pengeluaran Ditjen PHLHK Tahun 2016 (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.11.E4)																
	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perlengkapan (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.12)	Terlaksananya kegiatan Evaluasi Kebutuhan Sarpras Ditjen Gakum (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.12.E1)																
		Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran data Barang Milik Negara																

LAMPIRAN D

UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	Target						Rencana Alokasi (Rp '000)										
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019							
		(S1.P7.K5.UK4.1.EK1.12.EI2)																	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelola BMN (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.12.EI3)																	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Umum (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.13)	Terlaksananya Penataan Arsip dan Penghapusan Non Arsip Lingkup Setditjen GAKUM (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.13.EI1)														348,073	368,609	390,357	413,388
		Terlaksananya Pengelolaan Surat/ Dokumen Dinas (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.13.EI2)																	
		Tersedianya Layanan Rumah Tangga Pimpinan (S1.P7.K5.UK4.1.EK1.13.EI3)																	



GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK VI LT 4  
JL. GATOT SUBROTO, SENAYAN, DKI JAKARTA,  
10270